

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		
ARMANSYAH	BTN BUKIT MEMORY BLOK G NO. 08 WABOROBO BETOAMBARI	110	05-04-2022	05-04-2027	S-250/KO.0601/2022	05-07-2022	Ya	29-09-2026
ASTI	JL. JAMBU MENTE NO. 26A KEL. BATULO WOLIO	120	05-04-2022	05-04-2027	S-250/KO/0601.2022	05-07-2022	Ya	29-09-2026
USNIA, S.K.M., M.K.M	JL. MADE SABARA III LR. TORODALE NO.3 KEL. KORUMBA KEC. MANDONGA KOTA BAUBAU	210	27-10-2022	27-10-2026	S-403/KO.0601/2022	06-12-2022	Ya	16-09-2027

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		
02	31-07-2023	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 66 KENDARI	KINERJA BPR	23-11-2022	OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)				00	2	
03	03-12-2009	UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN	RENCANA BISNIS BANK (RBB)	08-11-2024	ZINSARI				01	1	
02	31-08-2022	UNIVERSITAS MANDALA WALUYA KENDARI	KINERJA BPR	23-11-2022	OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)	00	00	00			1

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal
FREDRIK BUYA PAKIDING	JL. PAHLAWAN KEL. BUKIT WOLIO INDAH KEC. WOLIO BAUBAU	00	00	00	00	02	31-12-2024	19/SK/2024	31-12-2024
DASNUR	JL. MURHUM NO. 21B KEL. NGANGANAUMALA KEC. MURHUM BAUBAU	00	00	02	00	00	31-12-2024	19/SK/2024	31-12-2024
FAHRIL	JL. HOGA KEL. KATOBENGKE KEC. BETOAMBARI BAUBAU	00	00	00	00	02	08-02-2021	01/SK/2021	08-02-2021
INGGRID FEBRIYANTI	BTN MEDYBRATA KEL. BWI KEL. WOLIO BAUBAU	02	02	00	02	00	26-12-2022	04/SK/2022	26-12-2022

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Keanggotaan Komite

Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	02

Form A.02.00
Data Kepemilikan BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	JL. DRS. ABDULLAH NO. 08 KEL. ANDUONOHU KEC. POASIA KENDARI SULAWESI TENGGARA	03	01	7.384.500.000	85,65	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KOTA BAUBAU	JL. PALAGIMATA KEL. LIPU KEC. BATUPOARO KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA	03	02	500.000.000	5,80	
KECAMATAN SE KOTA BAUBAU	KOTA BAUBAU	03	02	110.000.000	1,28	
KELURAHAN SE KOTA BAUBAU	KOTA BAUBAU	03	02	627.500.000	7,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	PERDA Provinsi Sulawesi Tenggara No. 02 Tahun 2009
Tanggal akta pendirian	18-05-2009
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	PERDA Provinsi Sulawesi Tenggara No. 03 Tahun 2013
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	10-07-2013
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/83/DKBU
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	22-01-2010
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	14-03-2011
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perbankan
Tempat kedudukan	Kota Baubau

No. Ijin Akuntan Publik : AP.0195

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	6.893.771.689
Beban Operasional	6.287.057.095
Pendapatan Non Operasional	34.607.500
Beban Non Operasional	192.428.841
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	448.893.253
Taksiran Pajak Penghasilan	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	448.893.253

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	6.463.863.207		0		0	6.463.863.207
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	2.494.061.909	0	0	0	0	2.494.061.909
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	18.207.186.901	3.063.641.453	107.496.789	328.956.404	502.252.473	22.209.534.020
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	27.165.112.017	3.063.641.453	107.496.789	328.956.404	502.252.473	31.167.459.136

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,43
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00
Non Performing Loan (NPL) Neto	1,61
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,80

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Return on Assets (ROA)	1,66
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	91,20
Net Interest Margin (NIM)	9,81
Loan to Deposit Ratio (LDR)	87,35
Cash Ratio	31,49

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Posisi Non Performing Loan (NPL) posisi 31 Desember 2024 sebesar 3.84 mengalami peningkatan sebesar 0.91 % dari tahun 2023 yaitu sebesar 2.92%, hal ini disebabkan karena adanya kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumtif mengalami keterlambatan pembayaran.
Langkah Penyelesaian	Langkah penyelesaian yaitu terus melakukan penagihan kredit bermasalah serta fokus pada peningkatan portopolio kredit yang relative aman dan berisiko rendah.

0

Nama BPR : PD BPR Bahteramas Baubau

Posisi Laporan : Tahun 2024

a. Perkembangan Usaha Bank

Perkembangan aset PD. BPR Bahteramas Baubau dalam kurun waktu 2 (dua) periode terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp6.712.189 ribu (26,61%) yaitu sebesar Rp25.229.023 ribu menjadi Rp 31.941.213 ribu. Peningkatan disisi aset yang besar berasal dari peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp2.808.077 ribu (13,21%). Sementara peningkatan di sisi kewajiban berasal dari peningkatan jumlah simpanan dari nasabah sebesar Rp222.948 ribu (1,21%), jumlah simpanan dari bank lain sebesar Rp263.641 ribu (6,89%) serta peningkatan jumlah penghimpunan dana tabungan dan deposito sebesar Rp486.589 ribu (7,87%). Adapun perkembangan rasio keuangan sebagai berikut:

Jenis Rasio	Indikator Kesehatan	Pemeriksaan Posisi		Mutasi	Kategori TKS
		31 Des 2024	31 Des 2023		
Capital Adequacy Ratio	$\geq 12\%$	15,66%	17,21%	(1,55%)	Sehat
Kualitas Aset Produktif	$\leq 10,35\%$	2,76%	2,49%	0,27%	Sehat
NPL Bruto	$\leq 5\%$	3,84%	2,92%	0,91%	Sehat
Rentabilitas:					
Return on assets (ROA)	$\geq 1,215\%$	1,66%	0,70%	0,95%	Sehat
Rasio BOPO	$\leq 93,52\%$	91,20%	88,31%	2,88%	Sehat
Likuiditas:					
Cash Ratio	$\geq 5\%$	31,47%	14,87%	16,60%	Sehat
Loan to Deposit Ratio	$\leq 94,75\%$	78,98%	92,93%	(13,96%)	Sehat

b. Kualitas Aset Produktif

Kredit *non-performing* mengalami peningkatan sebesar Rp302.188 ribu yaitu dari Rp621.526 ribu menjadi Rp923.714 ribu serta peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp2.808.077 ribu dari Rp21.254.725 ribu menjadi Rp24.062.802 ribu, sehingga rasio NPL naik dari 2,92% menjadi 3,84%. BPR telah membentuk Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) sebesar Rp679.384 ribu. Nilai PPKA yang dibentuk juga berdasarkan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh bank berdasarkan APHT dan Fidusia yang dapat menjadi pengurang pada pembentukan PPKA. Berikut adalah perhitungan Rasio Aset Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aset Produktif:

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Aset Produktif yang diklasifikasikan	Aset Produktif	KAP (%)
2023	557.598	22.412.005	2,49%
2024	790.020	28.665.030	2,76%

Pada tahun 2024, BPR mampu menjadikan rasio KAP dibawah 10,35% sehingga berdasarkan kriteria penilaian rasio KAP BPR dapat dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Besarnya rasio KAP yang diperoleh BPR menunjukkan bahwa BPR memiliki aset produktif bermasalah yang relatif kecil. Karena semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.

c. Kewajaran atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik Simpanan maupun Kredit Yang Diberikan (KYD) dilakukan secara wajar sebagaimana dengan pihak ketiga lainnya. Berikut adalah perbandingan Pemberian Suku Bunga Kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait :

(dalam ribuan rupiah)

Pihak Terkait		
Transaksi	Jumlah	Suku Bunga
Kredit Yang Diberikan	2.488.970	5% per tahun
Simpanan	2.308.701	0,5% - 6,75% per tahun
Pihak Tidak Terkait		
Transaksi	Jumlah	Suku Bunga
Kredit Yang Diberikan	21.573.832	5% - 30% per tahun
Simpanan	20.503.220	0,5% - 6,75% per tahun

d. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan POJK Nomor:5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum BPR, didalam POJK tersebut BPR harus memenuhi modal inti Rp3.000.000 ribu ditahun 2019 dan Rp6.000.000 ribu ditahun 2024. Modal inti yang dimiliki oleh BPR saat ini sebesar Rp2.554.146 ribu, tidak memenuhi ketentuan OJK diatas.

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 24/ SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK Nomor 8/ SEOJK.03/2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum 12% dari ATMR paling lambat 31 Desember 2019 dan menyediakan modal inti minimum 8% dari ATMR.

**Perhitungan Perhitungan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tahun 2024**

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Modal inti	2.554.146
Modal pelengkap	0
Jumlah Modal	2.554.146
Modal minimum (12% X ATMR) = (12% X 16.309.489)	1.957.138
Modal inti minimum (8% X ATMR) = (8% X 16.309.489)	1.304.759

Pada tahun 2024, KPMM modal minimum adalah sebesar Rp1.957.138 ribu, KPMM untuk modal inti Rp1.304.759 ribu sedangkan modal BPR sebesar Rp2.554.146 ribu, jadi BPR telah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum untuk tahun ini.

e. Loan Deposit Rasio (LDR).

LDR merupakan perbandingan antara kredit terhadap dana yang diterima BPR. Dana yang diterima BPR meliputi deposito dan tabungan, pinjaman bukan dari BPR lain lebih dari 3 bulan. Deposito dan

pinjaman dari BPR lain lebih dari 3 bulan, modal inti dan modal pinjaman. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh Deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan tingkat kemampuan BPR dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh Deposan.

Perhitungan LDR

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Kredit yang diberikan	Dana yang diterima oleh BPR	LDR (%)
2023	21.679.754	23.328.352	92,93%
2024	24.703.595	31.279.645	78,98%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BPR mampu menjadikan LDR berada dibawah 94,75% sehingga berdasarkan kriteria penilaian LDR BPR dapat dikategorikan dalam kelompok SEHAT.

- f. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya.

Perhitungan NPL (Bruto)

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Aset Produktif NPL	Total Kredit yang diberikan	NPL (%)
2023	621.527	21.254.725	2,92%
2024	923.714	24.062.802	3,84%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada tahun 2024, BPR mampu menjadikan NPL berada dibawah 5% sehingga berdasarkan kriteria penilaian NPL BPR dapat dikategorikan SEHAT. Penurunan NPL yang terjadi pada tahun 2024, disebabkan karena masih kecilnya Aset Produktif NPL yang diberikan masuk dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

- g. Return on Asset (ROA).

ROA adalah perbandingan laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Semakin besar ROA suatu BPR, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BPR tersebut dan semakin baik pula posisi BPR tersebut dari penggunaan aset. Berikut adalah perhitungan ROA:

Perhitungan ROA

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rata-rata Aset (12 Bulan Terakhir)	ROA (%)
2023	166.565	23.652.265	0,70%
2024	448.893	27.093.884	1,66%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut BPR mampu menjadikan ROA berada diatas 1,215% sehingga berdasarkan kriteria penilaian ROA BPR dapat dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Dengan plusnya rasio ROA ini menunjukkan bahwa BPR mampu dalam mengelola aset BPR yang dimiliki untuk menghasilkan laba.

h. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio BOPO adalah perbandingan biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan BPR dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu BPR dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.

Perhitungan BOPO

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Biaya Operasional	Pendapatan Operasional	BOPO (%)
2023	5.727.824	6.485.730	88,31%
2024	6.287.057	6.893.771	91,20%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BPR mampu menjadikan BOPO berada dibawah 93,52% sehingga berdasarkan kriteria penilaian BOPO BPR dapat dikategorikan dalam kelompok SEHAT.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PD. BPR Bahteramas Baubau

Posisi Laporan : Tahun 2024

PD. BPR bahteramas Baubau menerapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk memperkuat posisi kelembagaan dan meningkatkan kinerja keuangan melalui :

A. Strategi Peningkatan Kinerja :

1. Pemenuhan modal inti BPR;

Berdasarkan POJK Nomor:5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum BPR, BPR harus memenuhi modal inti Rp3.000.000 ribu ditahun 2019 dan Rp6.000.000 ribu ditahun 2024. Modal inti yang dimiliki oleh BPR saat ini sebesar Rp2.554.146 ribu, tidak memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR melakukan upaya pemenuhan modal inti dengan :

- a. Peningkatan Kinerja keuangan melalui peningkatan laba;
- b. Permohonan penambahan modal disetor dari Pemegang Saham BPR.

2. Peningkatan Asset;

Perkembangan aset PD. BPR Bahteramas Baubau dalam kurun waktu 2 (dua) periode terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp6.712.189 ribu (26,61%) yaitu dari Rp25.229.023 ribu menjadi Rp 31.941.213 ribu. Peningkatan disisi Aset yang besar berasal dari peningkatan jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp5.720.616 ribu (1.214%) dari Rp470.832 ribu menjadi Rp6.191.449 ribu. Sementara peningkatan di sisi kewajiban berasal dari peningkatan jumlah simpanan dari nasabah sebesar Rp222.948 ribu (1,21%), jumlah simpanan dari bank lain sebesar Rp263.641 ribu (6,89%) peningkatan jumlah penghimpunan dana tabungan dan deposito sebesar Rp486.589 ribu (7,87%). Adapun perkembangan rasio sebagai berikut :

Jenis Rasio	Indikator Kesehatan	Pemeriksaan Posisi		Mutasi	Kategori TKS
		31 Des 2024	31 Des 2023		
Capital Adequacy Ratio	≥ 12%	15,66%	17,21%	(1,55%)	Sehat
Kualitas Aset Produktif	≤ 10,35%	2,76%	2,49%	0,27%	Sehat
NPL Bruto	≤ 5%	3,84%	2,92%	0,91%	Sehat
Rentabilitas:					
Return on assets (ROA)	≥ 1,215%	1,66%	0,70%	0,95%	Sehat
Rasio BOPO	≤ 93,52%	91,20%	88,31%	2,88%	Sehat
Likuiditas:					
Cash Ratio	≥ 5%	31,47%	14,87%	16,60%	Sehat
Loan to Deposit Ratio	≤ 94,75%	78,98%	92,93%	(13,96%)	Sehat

3. Peningkatan portopolio kredit;

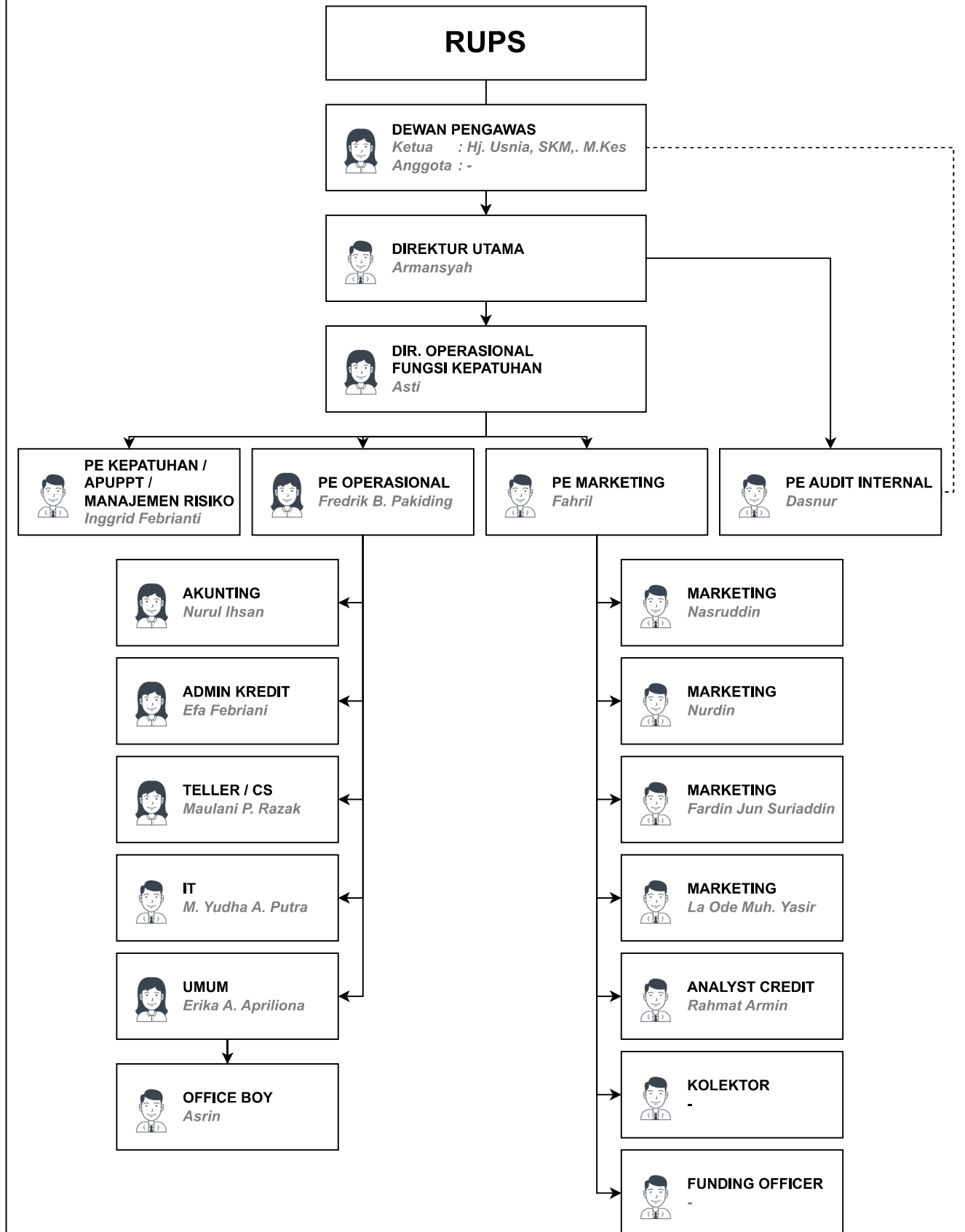
Kredit *non-performing* mengalami peningkatan sebesar Rp302.188 ribu yaitu dari Rp621.526 ribu menjadi Rp923.714 ribu serta peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp2.808.077 ribu dari Rp21.254.725 ribu menjadi Rp24.062.802 ribu, sehingga rasio NPL naik dari 2,92% menjadi 3,84%. BPR telah membentuk Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) sebesar Rp679.384 ribu. Nilai PPKA yang dibentuk juga berdasarkan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh bank berdasarkan APHT dan Fidusia yang dapat menjadi pengurang pada pembentukan PPKA.

B. Strategi Memperkuat Kelembagaan :

Transformasi kelembagaan dan Kepengurusan melalui :

- Proses Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- Proses Perubahan Status Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah;
- Rencana Proses Peleburan BPR.

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR BAHTERAMAS BAUBAU (PERSERODA)**



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan Bahteramas	Produk Tabungan yang ditujukan kepada masyarakat umum
01	01	Tabungan Pendidikan	Produk Tabungan yang ditujukan kepada pelajar baik tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA)
01	01	Tabungan BPR Lain	Produk Tabungan yang ditujukan pada BPR Lain seperti BPR Bahteramas Se-Sultra
01	01	Deposito Berjangka 1 Bulan	Produk Deposito yang ditujukan kepada Masyarakat Umum dengan tingkat penjaminan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
01	01	Deposito Berjangka 3 Bulan	Produk Deposito yang ditujukan kepada Masyarakat Umum dengan tingkat penjaminan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
01	01	Deposito Berjangka 6 Bulan	Produk Deposito yang ditujukan kepada Masyarakat Umum dengan tingkat penjaminan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
01	01	Deposito Berjangka 12 Bulan	Produk Deposito yang ditujukan kepada Masyarakat Umum dengan tingkat penjaminan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
02	01	Kredit Konsumtif Internal BPR	Produk kredit konsumtif bagi Pengurus dan Karyawan PD. BPR Bahteramas Baubau
02	01	Kredit Konsumtif	Produk kredit konsumtif bagi masyarakat umum baik karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) penerima tunjangan sertifikasi
02	01	Kredit Modal Kerja (KMK)	Produk kredit yang ditujukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pembiayaan konstruksi

0

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PD. BPR Bahteramas Baubau

Posisi Laporan : Tahun 2024

Penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

Dalam kegiatan operasional PD. BPR Bahteramas Baubau di dukung oleh :

1. *Core Banking System (CBS)*.

Dalam proses Peningkatan pelayanan dan transaksi secara efisien dan terpusat PD. BPR Bahteramas Baubau menggunakan *Core Banking System (CBS)*, Sistem ini digunakan untuk berbagai layanan seperti Pembukaan rekening tabungan, rekening deposito, rekening pinjaman, setoran tunai dan penarikan tunai serta transaksi keuangan lainnya;

2. Penggunaan tanda tangan secara digital

Dalam peningkatan pelayanan dan efisiensi serta kemudahan proses bisnis PD BPR Bahteramas Baubau telah menggunakan tanda tangan digital.

B. Sistem Keamanan

Untuk menjaga keamanan data dan transaksi yaitu :

1. Menerapkan kebijakan keamanan TI dalam melindungi data dan informasi keuangan.

2. Menggunakan *Disaster Recovery Center (DRC)* diluar kantor PD BPR Bahteramas Buabau.

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Dalam mendukung kegiatan operasional PD BPR Bahteramas Baubau telah bekerjasama dengan :

1. PT Sinergi Prakarsa Utama (Aplikasi Retail BPR Versi 6.60);

2. PERURI.

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PD. BPR Bahteramas Baubau

Posisi Laporan : Tahun 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha mengalami peningkatan secara signifikan dari peningkatan portopolio kredit dan peningkatan asset serta rasio keuangan dalam kategori sehat. Perkembangan usaha di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Kerjasama dengan beberapa BPR di luar Sulawesi Tenggara melalui kredit linkage;
2. Kerjasama dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau melalui pembayaran SPP dan uang pembangunan mahasiswa fakultas teknik;
3. Kerjasama dengan PD. BPR Bahteramas Baubau melalui kredit sindikasi

B. Target Pasar

Adapun target pasar :

1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Tabungan Bahteramas :
 - a. Fokus pada peningkatan tabungan bahteramas melalui pegawai, pengusaha dan pedagang lingkup Kota Baubau;
 - b. Fokus pada peningkatan Tabungan Pendidikan melalui sekolah-sekolah yang ada di Kota Baubau seperti taman kana-kanak (TK), Tingkat Sekolah Dasar (SD), Tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) maupun sekolah menengah atas (SMA).
2. Penyaluran Dana
 - a. Fokus pada penyaluran kredit yang relatif aman dan berisiko rendah;
 - b. Fokus pada penyaluran kredit berisiko rendah diluar Kota Baubau.

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		
001	KANTOR PUSAT	-5.462387,122.604310	BATARAGURU NO. 39	MURHUM	6990	93726	ARMANSYAH	0402-2824600

Form A.05.05
 Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
 (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						
0	0	7	1	3	0	0	0	2	0	2	0	0	01	0	3	0	0

Form A.05.05
 Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
 (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai						
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya
0	0		4					4	3	4	1	1	2

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan
Pelayanan Kas

Tanggal Pelaksanaan

Sandi Kantor Kendali

Tanggal Persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
Astra Credit Companies (ACC)	Pembiayaan	PD. BPR Bahteramas Baubau melakukan pembelian mobil operasional BPR melalui pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) Kendari	24-04-2021
PT.BPR Bank Jombang	Kredit Linkage	PD.BPR Bahteramas Baubau menerima pinjaman dari PT.BPR Bank Jombang sebesar Rp. 2.500.000.000,-(Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)	29-04-2024
PD. BPR Bahteramas Wakatobi	Kredit Linkage	PD. BPR Bahteramas Baubau menerima pinjaman dari PD. BPR Bahteramas Wakatobi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)	13-05-2024
PT. BPR Delta Artha	Kredit Linkage	PD. BPR Bahteramas Baubau menerima pinjaman dari PT. BPR Delta Artha sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)	29-10-2024
PT. BPR Surya Artha Utama Perseroda	Kredit Linkage	PD. BPR Bahteramas Baubau menerima pinjaman dari PT. BPR Surya Artha Utama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)	21-11-2024
PD. BPR Bahteramas Buton Utara	Kredit Sindikasi	PD. BPR Bahteramas Baubau dan enam (6) PD. BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas kredit untuk tambahan modal pembangunan fakultas kedokteran pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pemberian kredit ini system sindikasi. PD. BPR Bahteramas Baubau sebagai Leader dengan porsi sebesar Rp. 500.000.000 sedangkan PD. BPR Bahteramas Buton Utara Porsi Kredit Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)	16-08-2024
PD. BPR Bahteramas Buton	Kredit Sindikasi	PD. BPR Bahteramas Baubau dan enam (6) PD. BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas kredit untuk tambahan modal pembangunan fakultas kedokteran pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan PD. BPR Bahteramas Buton Porsi Kredit Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)	16-08-2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
PD. BPR Bahteramas Wakatobi	Kredit Sindikasi	PD. BPR Bahteramas Baubau dan enam (6) PD. BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas kredit untuk tambahan modal pembangunan fakultas kedokteran pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pemberian kredit ini System Sindikasi. PD. BPR Bahteramas Baubau sebagai Leader dengan Porsi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan PD. BPR Bahteramas Wakatobi Porsi Kredit Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)	16-08-2024
PD. BPR Bahteramas Konawe Selatan	Kredit Sindikasi	PD. BPR Bahteramas Baubau dan enam (6) PD. BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas kredit untuk tambahan modal pembangunan fakultas kedokteran pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pemberian kredit ini System Sindikasi. PD. BPR Bahteramas Baubau sebagai Leader dengan Porsi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan PD. BPR Bahteramas Konawe Selatan Porsi Kredit Sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)	16-08-2024
PD. BPR Bahteramas Bombana	Kredit Sindikasi	PD. BPR Bahteramas Baubau dan enam (6) PD. BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas kredit untuk tambahan modal pembangunan fakultas kedokteran pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pemberian kredit ini System Sindikasi. PD. BPR Bahteramas Baubau sebagai Leader dengan Porsi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan PD. BPR Bahteramas Bombana Porsi Kredit Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)	16-08-2024
PD. BPR Bahteramas Kolaka	Kredit Sindikasi	PD. BPR Bahteramas Baubau dan enam (6) PD. BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas kredit untuk tambahan modal pembangunan fakultas kedokteran pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pemberian kredit ini System Sindikasi. PD. BPR Bahteramas Baubau sebagai Leader dengan Porsi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan PD. BPR Bahteramas Kolaka Porsi Kredit Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)	16-08-2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	5
2. Pelayanan	4
3. Lainnya	6
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	11
2. Pegawai Tidak Tetap	4
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	0
3. S1	9
4. D3	1
5. SMA	5
6. Lainnya	0
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	10
2. Perempuan	5
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	1
2. Usia 26-35 tahun	9
3. Usia 36-45 tahun	4
4. Usia 46-55 tahun	1
5. Usia >55 tahun	0

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Pelatihan TKS	10-01-2024	02	03	1	Pelatihan tentang perhitungan TKS melalui Corebanking System Aplikasi Retail BPR (ARB)
Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (Level 1)	08-06-2024	02	02	1	Kegiatan Sertifikasi Manajemen Risiko
Pelatihan Strategi dan Eksekusi Kredit Haji dan Umroh	20-06-2024	02	03	2	Pelatihan mengenai produk haji dan umroh termasuk ketentuan internal produk haji dan umroh serta strategi pemasaran produk tersebut
Pelatihan Mengelola Aset	07-08-2024	02	02	2	Pelatihan tentang Pencatatan Aset BPR serta Perhitungan Penyusutan Aset
Pelatihan Audit Berbasis Risiko	08-08-2024	02	03	2	Pelatihan tentang Audit BPR
Pelatihan Sippena	03-09-2024	02	03	1	Pelatihan Pelaporan APU & PPT
Pelatihan Menerapkan Strategi Anti Fraud	04-09-2024	02	03	1	Pelatihan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud
Workshop SAK-EP	11-09-2024	02	03	1	Pengenalan tentang SAK-EP dan Perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB)	08-11-2024	02	02	2	Pelatihan mengenai cara Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah	839.504.000	252.797.000
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Penempatan pada Bank Lain	6.463.863.207	2.718.634.694
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2.069.317	0
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	24.703.595.929	21.679.754.124
-/- Provisi Belum Diamortisasi	620.094.340	368.692.806
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	13.251.262	30.341.134
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	7.447.692	25.995.034
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	679.384.896	378.585.687
Penyertaan Modal	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	
Aset Tetap dan Inventaris	1.020.064.000	951.609.000
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	684.455.302	598.465.858
Aset Tidak Berwujud	0	0
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	0	0
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Aset Lainnya	920.888.907	1.028.308.954
TOTAL ASET	31.941.213.234	25.229.023.253
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	92.689.580	39.867.298
Simpanan		
a. Tabungan	4.116.050.093	4.003.101.902
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	14.608.000.000	14.498.000.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	4.087.871.689	3.824.230.151

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	6.191.449.002	470.832.942
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	66.559.886	63.291.229
TOTAL LIABILITAS	29.162.620.250	22.899.323.522
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	25.000.000.000	25.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	16.378.000.000	16.378.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	0	0
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	(6.292.300.269)	(6.458.864.909)
b. Tahun Berjalan	448.893.253	166.564.640
TOTAL EKUITAS	2.778.592.984	2.329.699.731

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional	6.893.771.689	6.485.729.772
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro	17.182.696	3.194.118
Tabungan	21.018.551	27.484.114
Deposito	5.744.041	5.086.198
Sertifikat Deposito	0	0
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	4.693.085.954	4.058.357.370
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	499.323.466	285.781.224
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	430.966.151	316.187.665
e Pemulihan CKPN	1.051.258.448	1.494.900.393
f Dividen	0	
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	
h Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya	175.192.382	294.738.690
Beban Operasional	6.287.057.095	5.727.824.155
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	37.879.078	20.225.131
ii. Deposito	1.043.654.343	965.533.637
iii. Simpanan dari bank lain	234.580.299	295.229.009
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia	0	0
2) Dari Bank Lain	261.205.349	33.223.640
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	13.294.526	25.292.577
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v. Lainnya	88.176.000	0
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	30.290.143	500.000
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.323.836.831	1.635.536.092
d. Penyertaan Modal	0	
e. Aset Keuangan Lainnya	0	
4 Beban Pemasaran	28.866.500	16.992.000
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	1.455.740.089	1.327.604.249
ii. Honorarium	135.298.727	159.204.647
iii. Lainnya	121.021.883	102.206.686
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	123.853.464	89.982.583
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor	75.000.000	75.000.000
ii. Lainnya	40.499.995	40.167.003
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	85.989.445	81.962.736
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
f Beban Premi Asuransi	174.777.810	174.684.986
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	18.157.000	33.707.500
h Beban Barang dan Jasa	852.011.451	507.562.224
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal	0	
b. Kejahatan eksternal	0	
k Pajak-pajak	27.761.200	19.578.947
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	
d Kerugian penjualan AYDA	0	0
e Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f Lainnya	115.162.962	123.630.508
Laba (Rugi) Operasional	606.714.594	757.905.617
Pendapatan Non Operasional	34.607.500	16.706.243
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	34.607.500	16.706.243
Beban Non Operasional	192.428.841	608.047.220
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	192.428.841	608.047.220
Laba (Rugi) Non Operasional	(157.821.341)	(591.340.977)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	448.893.253	166.564.640
Taksiran Pajak Penghasilan	0	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	448.893.253	166.564.640
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	448.893.253	166.564.640

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	409.291.879	340.672.665
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	
4) Lainnya	0	
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	6.243.788.490	6.547.993.961
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	4.081.825.568	4.250.263.068
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	37.106.443.181	38.538.105.467
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
Saldo per 31 Des Tahun T-2	2.163.135.091	2.163.135.091	0	0	0
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	292.463.801	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	166.564.640	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T-1	2.455.598.892	2.329.699.731	0	0	0
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	569.268.183	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T	2.455.598.892	2.898.967.914	0	0	0

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
0	0	0	0	4.326.270.182
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	292.463.801
0	0	0	0	166.564.640
0	0	0	0	4.785.298.623
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	569.268.183
0	0	0	0	5.354.566.806

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	(4.737.031.243)	(4.094.121.801)
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	(499.323.466)	(285.781.224)
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	(1.657.416.982)	(2.105.826.750)
Pembayaran beban bunga	1.678.789.595	1.339.503.994
Beban gaji dan tunjangan	1.712.060.699	1.589.015.582
Beban umum dan administrasi	2.660.668.911	2.675.674.073
Beban operasional lainnya	115.162.962	123.630.508
Pendapatan non operasional lainnya	6.518.159.273	2.268.951.577
Beban non operasional lainnya	192.428.841	608.047.220
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	3.745.228.512	(673.565.125)
Kredit yang diberikan	2.808.077.488	3.286.317.439
Agunan yang diambil alih	0	(324.333.334)
Aset lain-lain	(174.753.286)	(618.409.691)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(52.822.282)	(9.104.932)
Tabungan	(6.207.234.376)	(1.079.341.581)
Deposito	(110.000.000)	(610.000.000)
Simpanan dari bank lain	(263.641.538)	246.564.042
Pinjaman yang diterima	(5.720.616.060)	72.118.706
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	(28.587)	23.251.788
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	7.708.461	2.432.590.491
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(68.455.000)	(30.250.000)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	(68.455.000)	(30.250.000)
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	(60.746.539)	2.402.340.491
Kas dan setara Kas awal periode	60.746.539	(2.402.340.491)
Kas dan setara Kas akhir periode	0	0

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00027/2.1423/AU.2/07/0195-2/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi

PD. BPR Bahteramas Baubau

Jl. Bataraguru No. 39 Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau - Sulawesi Tenggara 93725

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PD. BPR Bahteramas Baubau ("Bank"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan bank.

Habib Basuni dan Rekan

Kantor Akuntan Publik

Izin No. KEP-354/KM.1/2023

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Habib Basuni dan Rekan



Habib Basuni, SE., Ak., M.Ak., CA. CPA. ASEAN CPA
No. Ijin Akuntan Publik : AP.0195

17 Maret 2025



Habib Basuni dan Rekan

Kantor Akuntan Publik

Izin No. KEP-354/KM.1/2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	Habib Basuni, SE.,M.Ak.,CA. CPA. ASEAN CPA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PD. BPR bahteramas Baubau

Posisi Laporan : Tahun 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PD. BPR Bahteramas Baubau menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahunan ini. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Habib Basuni, SE.,Ak.,M.Ak CA.CPA.ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Rekan;
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya;
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2024 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Baubau 24 April 2025

PD. BPR Bahteramas Baubau


Armansyah
Direktur Utama




Asti
Direktur Operasional

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl. Bataraguru No. 39 Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau
Nomor Telepon	0402-2824600
Penjelasan Umum	BPR merupakan Lembaga Intermediasi Keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, maka Penerapan TATA Kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	PD. BPR Bahteramas Baubau dalam kegiatan usaha akan terus meningkatkan Penerapan Tata Kelola serta melakukan pengkinian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
ARMANSYAH	Direktur Utama	Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur BPR dan aturan perbaikan lainnya, Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Membuat Rencana Bisnis Bank (RBB), Menjaga BPR agar selalu sehat, Memastikan seluruh Operasional kantor berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Mewakili BPR dalam menandatangani MOU dengan pihak lain, Mewakili BPR dalam hal terjadinya gugatan hukum dengan pihak lain, Menunjuk pihak lain untuk mewakili BPR dalam hal terjadinya gugatan hukum dengan pihak lain, Membuat keputusan strategis dalam hal kemajuan BPR, Wajib minidanklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Lainnya, Mengikuti Komite Kredit, Mencari dana pihak ketiga, Mengotorisasi transaksi sesuai dengan wewenang, Membantu Dewan Pengawas membuat Laporan Dewan Pengawas, Mengawasi menilai dan mengoreksi pelaksanaan operasional BPR, Membuat SOP dan aturan internal lainnya, Menerima laporan dari Direktur Operasional dan Manager, Mengunjungi nasabah yang bermasalah maupun calon nasabah, Mengangkat dan memberhentikan karyawan, Menjaga peralatan kantor yang ada dalam kuasanya, Memberikan edukasi kepada bawahannya guna peningkatan pengetahuan untuk kemajuan BPR, Melakukan rotasi, promosi dan demosi kepada karyawan, Direktur Utama membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta Pejabat Eksekutif Manager Operasional, Manager Pemasaran serta seluruh unit kerja operasional BPR, Direktur Utama wajib melaporkan perkembangan kegiatan usaha kepada Dewan Pengawas dan kepada Pemegang Saham

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterangan

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
USNIA, S.K.M., M.K.M	Komisaris Utama dan Independen	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, Dewan Pengawas wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti semua temuan baik temuan audit internal, eksternal maupun temuan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lainnya, memberhentikan sebagian dan/atau semua anggota Direksi dengan alasan-alasan tertentu.

Rekomendasi kepada Direksi

Fokus pada Penyelesaian Kredit Hapus Buku dan Pemenuhan Modal Inti BPR

Keterangan

0

Form E.02.03
Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program
Kerja Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	--------------

BPR memiliki Modal Inti < dari 50 M

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite)

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
ARMANSYAH				
ASTI				
Anggota Dewan Komisaris				
USNIA, S.K.M., M.K.M				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

0

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
ARMANSYAH	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham
ASTI	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi		
	Anggota Dewan Komisaris		
	Pemegang Saham		

0

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	168.708.120	1	134.729.148
Tunjangan	2	168.708.120	0	0
Tantiem	0	0	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		337.416.240		134.729.148
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	2	36.000.000	0	0
Transportasi	0	0	0	0
Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	35.137.392	0	0
Total Fasilitas Lain		71.137.392		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		408.553.632		134.729.148

Kesejahteraan Pengurus dan Karyawan BPR telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	217,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	127,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	125,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	250,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	278,00

BPR memberikan kesejahteraan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
28-03-2024	19	Pembahasan : a. Kebijakan Strategi, b. Isu Strategi, c. Evaluasi Kinerja. Adapun saran-saran : 1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, 2. Manajemen Kearsipan, 3. Laporan Manajemen Risiko Bulanan atau triwulan, 4. Deteksi dini fraud, 5. Penyelesaian kredit hapus buku
28-04-2024	4	Fokus kepada pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat untuk PD. BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar) rupiah paling lambat 31 Desember 2024. Menindaklanjuti seluruh temuan baik Temuan Otoritas Jasa Keuangan maupun temuan Audit Internal. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yaitu : Kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Dalam rangka peningkatan penyaluran kredit BPR maka disetujui untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan pakta integritas yang telah ditandatangani. Peningkatan penyelesaian kredit hapus buku total kredit hapus buku sebesar Rp. 6.527.858.000,- sesuai dengan ketentuan internal Direksi dan Karyawan yang berhasil menyelesaikan kredit hapus buku diberikan fee, apabila hal ini belum berjalan secara maksimal dimungkinkan untuk penambahan karyawan khusus untuk penanganan kredit hapus buku.
28-06-2024	3	Fokus kepada pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat untuk PD. BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar) rupiah paling lambat tanggal 31 Desember 2024, Kinerja Direksi dan seluruh karyawan mengalami peningkatan, walaupun belum optimal utamanya yang terkait dengan penyelesaian kredit hapus buku, kredit hapus buku masih menjadi beban utama pada PD. BPR Bahteramas Baubau, Pengurus telah memperluas jaringan nasabah dengan para guru yang bersertifikasi untuk menekan kredit bermasalah. Saran-saran : 1. Peningkatan dana pihak ketiga, 2. Menjalin kerjasama dengan guru sertifikasi, 3. Melakukan pendekatan kepada PSP dan PEMDA, 4. Mengoptimalkan Kinerja BPR.
22-07-2024	4	Fokus kepada pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat untuk PD. BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp. 6.000.000.000,- paling lambat 31 Desember 2024, Menjalin kerjasama dengan PEMDA khususnya Dinas Pendidikan untuk Rekomendasi Tabungan murid/siswa yang ada di Kota Baubau dan pembayaran TPP melalui BPR, Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan memperhatikan POJK 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dengan kategori : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Dalam rangka peningkatan penyaluran kredit disetujui untuk kredit linkage. Deteksi dini fraud Direksi dan Karyawan. Peningkatan penyelesaian kredit hapus buku.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
02-08-2024	3	Menindaklanjuti surat dari OJK Nomor SR-33/KO.1602/2024 tentang Konsolidasi BPR. Bersama PSP menindaklanjuti konsultasi perubahan PERDA terkait dengan peleburan. Fokus pada pemenuhan modal inti BPR. Menjalin kerjasama dengan pihak Universitas yang ada di Kota Baubau khusus untuk pembayaran SPP dan dana operasional Universitas melalui BPR. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Deteksi dini fraud Direksi dan Karyawan. Peningkatan penyelesaian kredit hapus buku. Untuk masalah likuiditas dimungkinkan untuk melakukan rekrutmen marketing funding. Untuk PE Audit Internal lebih maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, PE-Kepatuhan agar memperhatikan pelaporan yang menjadi kewajiban BPR.

0

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
USNIA, S.K.M., M.K.M	5	0	100,00

Kehadiran Dewan Pengawas sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Pada tahun 2024 tidak terjadi penyimpangan internal/fraud baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan BPR.

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Pada tahun 2024 Laporan BPR tidak terlibat dalam permasalahan hukum baik hukum perdata maupun pidana dengan pihak debitur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Pada tahun 2024 Laporan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
19-02-2024	01	Sumbangan untuk berkebutuhan khusus (Tuna Rungu)	Pribadi yang bersangkutan	200.000
02-05-2024	02	Open Turnamen Volly Ball Bombana Cup II 2024	Panitia	12.500.000
16-01-2024	02	HUT Walikota Baubau (Pembelian Tumpeng)	Keluarga	1.000.000
26-04-2024	01	Sumbangan Dukacita	PE-Audit Internal BPR	1.000.000
23-05-2024	01	Karangan Bunga Dukacita	PE-Manager Pemasaran	600.000
22-06-2024	02	HUT BPR-BPRS	Panitia	8.352.000
22-06-2024	02	HUT Sultra Koltim	Panitia	8.000.000
28-08-2024	01	Karangan Bunga Dukacita	H. Nuddin (Deposan)	600.000
15-09-2024	01	Karangan Bunga Dukacita	Mantan Karyawan BPR	600.000
11-10-2024	01	Karangan Bunga Dukacita	Wolowa	600.000
16-10-2024	02	HUT Kota Baubau	Kegiatan Haroana Baubau	4.000.000

Karena BPR merupakan Bank milik Pemerintah Daerah maka berperan aktif dalam kegiatan sosial dan politik

**LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
PD BPR BAHTERAMAS BAUBAU
TAHUN 2024**

1. STRATEGI KEBERLANJUTAN

a. Strategi Bisnis

- Perbaikan permodalan melalui penambahan modal disetor dan peningkatan laba serta peleburan BPR;
- Peningkatan likuiditas melalui penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito serta peningkatan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, kepatuhan, manajemen risiko serta audit internal;

b. Kerjasama dengan pihak eksternal

Dalam rangka melaksanakan program-program tersebut PD. BPR Bahteramas Baubau akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya.

2. IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

Adapun kinerja BPR tiga tahun terakhir yaitu :

Keterangan	2022	2023	2024
Aset	24.465.803.811	25.229.023.253	31.941.213.234
Penempatan Pada Bank Lain (ABA)	4.077.102.891	2.718.634.694	6.463.863.207
Kredit yang diberikan	17.992.007.562	21.679.754.124	24.703.595.929
Tabungan	3.705.686.226	4.003.101.902	4.116.050.093
Deposito	13.888.000.000	14.498.000.000	14.608.000.000
Simpanan Dari Bank Lain (ABP)	4.070.794.193	3.824.230.151	4.087.871.689
Modal Inti	2.163.135.091	2.329.699.731	2.778.592.984
Pendapatan Operasional	4.682.109.610	6.485.729.772	6.893.771.689
Beban Operasional	4.319.375.550	5.727.824.155	6.287.057.095

Laba Rugi Operasional	362.734.060	757.905.617	606.714.594
Pendapatan Non Operasional	976.242	16.706.243	34.607.500
Beban Non Operasional	71.246.496	608.047.220	192.428.841
Laba Rugi Non Operasional	70.270.254	591.340.977	157.821.341
Laba Rugi	292.463.806	166.564.640	448.893.253
RASIO :			
CAR	16,95	17,89	16,43
KAP	2,98	2,32	2,58
PPAP	100,00	100,00	100,00
NPL Gross	3,91	2,91	3,80
NPL NET	2,73	1,70	1,61
ROA	1,41	0,69	1,66
BOPO	92,25	88,31	91,20
LDR	76,71	92,93	87,35
CR	25,50	14,87	31,49

3. PROFIL SINGKAT BPR

a. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi BPR yang sehat dan terpercaya dalam pembiayaan UMKM

Misi:

- a. Melayani penyaluran kredit yang cepat;
- b. Menyediakan produk perbankan yang berdaya saing tinggi guna meningkatkan kualitas kesejahteraan Masyarakat;
- c. Memperkuat permodalan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan;
- d. Membangun Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan unggul dalam pengelolaan BPR;
- e. Memperluas jaringan Operasional Pelayanan berbasis Teknologi Informasi.

b. Data Perusahaan

1. Nama BUMD : PD. BPR Bahteramas Baubau
2. Alamat : Jl. Bataraguru No. 39 Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau
3. Badan Hukum : Perusahaan Daerah

4. Bidang Usaha : Perbankan (Bank Perkreditan Rakyat)
5. Tujuan BUMD : Pemberdayaan UMKM
6. Tanggal/tahun/operasional : Maret 2011
7. Dasar Pendirian : - Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013
8. Jumlah Modal : **Rp. 8.622.000.000,-**
9. Jumlah Penyertaan Pemerintah
 - a. Pemerintah Provinsi : Rp. 7,384,500,000,- (85.65 %)
 - b. Pemerintah Kota : Rp. 500,000,000,-
 - c. Kecamatan : Rp. 110,000,000,-
 - d. Kelurahan : RP. 627,500,000,-
 - Total : **Rp. 8.622.000.000,-**
10. Jumlah Dewan Pengawas : 1 Orang
 - a. Ketua Dewan Pengawas, **Hj. Usnia, S.K.M.,M.K.M**
11. Jumlah Direksi : 2 Orang
 - a. Direktur Utama, **Armansyah, S.T.,M.M**
 - b. Direktur Operasional, **A s t i, S.E**
12. Jumlah Pejabat Eksekutif : 4 Orang
 - a. Manager Operasional, **Dasnur, S.H**
 - b. Manager Pemasaran, **Fahril, S.Pd**
 - c. Audit Internal, **Fredrik Buya Pakiding, S.E**
 - d. Kepatuhan, **Inggrid Febriyanti, S.E**
13. Jumlah Karyawan : 12 Orang
14. Data Keuangan
 - a. Total Aset Tahun 2024 : Rp31.941.213.234,-
 - b. Total Ekuitas Tahun 2024 : Rp 2.778.592.984,-
 - c. Total Pendapatan Tahun 2024 : Rp 6.928.379.189,-
 - d. Total Biaya Tahun 20234 : Rp 6.479.485.936,-
 - e. Total Laba Thn 2024 : Rp 448.893.253,-
15. Laporan Keuangan diperiksa :
 - a. Nama KAP : **Habib Basuni & Rekan**
 - b. Opini : Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi kinerja keuangan dengan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

c. Produk

Adapun produk layanan PD. BPR Bahteramas Baubau yaitu :

1. Penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan deposito
2. Penyaluran kredit (Kredit Konsumtif dan Modal Kerja serta Investasi)

d. Keanggotaan pada asosiasi

PD. BPR Bahteramas Baubau salah satu BPR yang terdaftar dalam anggota DPD PERBARINDO Sultra dan PERBAMIDA Sulseitra;

4. PENJELASAN DIREKSI

PD. BPR Bahteramas Baubau menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan strategi berkelanjutan, seperti:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi
- Kurangnya literasi keuangan dan kesadaran lingkungan masyarakat
- Tekanan untuk tetap kompetitif dengan lembaga keuangan dengan system kredit KUR
- Ketergantungan pada sektor mikro dan UMKM yang rentan terhadap perubahan ekonomi

a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan :

Kebijakan Internal

- Menilai portofolio kredit berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial
- Pelatihan rutin untuk karyawan mengenai keuangan berkelanjutan
- Pembentukan tim khusus keberlanjutan di internal BPR
- Peningkatan Kegiatan Literasi dan Inklusi bagi masyarakat

5. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Tata kelola berkelanjutan di PD. BPR Bahteramas Baubau telah diterapkan melalui prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip ini telah menjadi budaya dan perilaku bisnis yang tercermin dalam kewajaran transaksi usaha, keterbukaan informasi, dan perilaku manajemen yang sehat;

Untuk memperkuat tata kelola dan mendukung transformasi bisnis, PD BPR Bahteramas Baubau telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Perubahan Status Badan Hukum:** Berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ;
2. **Perubahan Nomenklatur:** Nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan regulasi pemerintah;
3. **Penyetaraan Modal Daerah:** Pemprov Sultra memberikan penyertaan modal untuk memenuhi persyaratan modal minimal sesuai ketentuan OJK;

4. **Penyesuaian Struktur Pengawasan:** Mengubah badan pengawas menjadi Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pengawasan;

Selain itu, PD. BPR Bahteramas Baubau juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi kinerja;

Dengan langkah-langkah tersebut PD. BPR Bahteramas Baubau berupaya memperkuat tata kelola berkelanjutan dan meningkatkan kontribusinya terhadap Perekonomian Daerah.

6. KINERJA KEBERLANJUTAN

1. Kinerja

Keterangan	2022	2023	2024
Aset	24.465.803.811	25.229.023.253	31.941.213.234
Penempatan Pada Bank Lain (ABA)	4.077.102.891	2.718.634.694	6.463.863.207
Kredit yang diberikan	17.992.007.562	21.679.754.124	24.703.595.929
Tabungan	3.705.686.226	4.003.101.902	4.116.050.093
Deposito	13.888.000.000	14.498.000.000	14.608.000.000
Simpanan Dari Bank Lain (ABP)	4.070.794.193	3.824.230.151	4.087.871.689
Modal Inti	2.163.135.091	2.329.699.731	2.778.592.984
Pendapatan Operasional	4.682.109.610	6.485.729.772	6.893.771.689
Beban Operasional	4.319.375.550	5.727.824.155	6.287.057.095
Laba Rugi Operasional	362.734.060	757.905.617	606.714.594
Pendapatan Non Operasional	976.242	16.706.243	34.607.500
Beban Non Operasional	71.246.496	608.047.220	192.428.841
Laba Rugi Non Operasional	70.270.254	591.340.977	157.821.341
Laba Rugi	292.463.806	166.564.640	448.893.253

RASIO :			
CAR	16,95	17,89	16,43
KAP	2,98	2,32	2,58
PPAP	100,00	100,00	100,00
NPL Gross	3,91	2,91	3,80
NPL NET	2,73	1,70	1,61
ROA	1,41	0,69	1,66
BOPO	92,25	88,31	91,20
LDR	76,71	92,93	87,35
CR	25,50	14,87	31,49

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pada tahun 2024, PD BPR Bahteramas Baubau telah melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman kepada Pelajar maupun Masyarakat umum terhadap produk dan layanan keuangan.



Consulting



PENERAPAN
TATA KELOLA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

SETUP DAN DATA BPR

Nama BPR

PD. BPR BAHTERAMAS BAUBAU

Alamat

JALAN BATARAGURU NO.39 KELURAHAN WAJO, KECAMATAN MURHUM
KOTA BAUBAU

◀ sisa 83 karakter

No Telpon

0402-2824600

◀ sisa 3 karakter

Sandi BPR

602668

Posisi Laporan

30/06/2024

◀ sesuai format tanggal komputer

2024-06-30

Modal Inti

Rp. 2.729.958.401

Jika aset < Rp10 miliar:

Total Aset

Rp. 25.380.220.827

apakah telah diaudit oleh KAP?

Y

Bobot Faktor BPR

B

Status Audit

1

Diaudit oleh KAP

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki 2 (dua) orang Direksi salah satu anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan.	1909
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua Direksi BPR bertempat tinggal di Kota yang sama dengan kantor BPR.	1928
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Kedua Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank maupun lembaga keuangan lain.	1923
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Kedua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1890
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perseorangan atau jasa konsultan.	1931
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Kedua Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1886
Total nilai skala penerapan		6		
Rata-rata		1,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	1936
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dari semua pihak terkait.	1932
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan semua informasi yang diminta Dewan Komisaris.	1935
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sebagian besar keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat.	1933

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.	1944
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi selalu mengikut sertakan karyawan BPR untuk mengikuti pelatihan dan/atau pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi BPR.	1868
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya.	1941
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman kerja.	1952
	Total nilai skala penerapan	10		
	Rata-rata	1,25		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,50		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan jawabnya pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1908
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis dibidang kepegawaian.	1901
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Berita acara rapat di dokumentasikan dengan baik	1952
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.	1937
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1913
	Total nilai skala penerapan	7		
	Rata-rata	1,40		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,14		

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	BPR memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris	1957
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki 2 (dua) orang Direksi dan 1 (satu) orang Komisaris,	1936
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	3	Dewan Komisaris BPR telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit dan Proper Test.	1920
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Dewan Komisaris BPR bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor BPR.	1922
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh) milyar rupiah.	1922
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	BPR telah memiliki aturan tentang tata kerja Dewan Komisaris.	1939
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	5	Salah satu Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR lain.	1923
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1858
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	5	BPR dengan modal kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh) milyar rupiah belum memiliki Komisaris Independen.	1889
Total nilai skala penerapan		27		
Rata-rata		3		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.	1880

2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Komisaris Intensif dalam hal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPR.	1916
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.	1916
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Direksi menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan kepada Dewan Pengawas.	1922
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris melaksanakan rapat bersama Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1906
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	1927
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.	1927
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1851
Total nilai skala penerapan		14		
Rata-rata		1,75		
Bobot		40%		
Nilai proses penerapan		0,70		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan diarsipkan dengan baik.	1914
Total nilai skala penerapan		2		
Rata-rata		2,00		
Bobot		10%		
Nilai hasil penerapan		0,20		

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE





Khusus BPR Modal Inti ≥ Rp 80 milyar

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	-		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0		1999
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0		1999
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	-		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	-		

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN				
No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki Kebijakan tentang benturan kepentingan.	1942
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan dan mengurangi keuntungan BPR.	1877
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan pada BPR.	1955
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN				
No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	1919
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	1908
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1916
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	1890
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki ketentuan internal tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab fungsi kepatuhan.	1907
	Total nilai skala penerapan	6		
	Rata-rata	1,20		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,60		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	BPR telah memiliki sistem dan prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha.	1912
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR telah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	1931
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memberikan saran dan/atau pencegahan secara lisan apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1813
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan seluruh kegiatan usaha BPR sesuai dengan sistem dan prosedur.	1877
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Kepatuhan akan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1790
	Total nilai skala penerapan	9		
	Rata-rata	1,80		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,72		


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Terjadinya penurunan pelanggaran	1968
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pokok-pokok pelaksanaan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan diketahui oleh Direktur Utama.	1887
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan belum menyampaikan laporan khusus karena sampai saat ini belum ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	1797
Total nilai skala penerapan		9		
Rata-rata		3,00		
Bobot		10%		
Nilai hasil penerapan		0,30		

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal	1910
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif audit internal telah mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur	1910
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif audit internal indenpenden terhadap satuan kerja operasional	1922
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif fungsi audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama	1921
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	BPR tidak memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern	1889
Total nilai skala penerapan		11		
Rata-rata		2,20		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,10		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1929
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh) milyar rupiah.	1918
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Kegiatan audit dilaksnakan secara memadai dan independen	1944
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR mengikutkan Pejabat Eksekutif audit internal dalam pendidikan dan pelatihan	1921
Total nilai skala penerapan		7		
Rata-rata		1,75		
Bobot		40%		
Nilai proses penerapan		0,70		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan pejabat eksekutif fungsi audit internal disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1886
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit internal tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	1922

3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh) milyar rupiah.	1920
4	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan	1846
	Total nilai skala penerapan	7		
	Rata-rata	1,75		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,18		


PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN				
Khusus bagi BPR yang memiliki aset \geq Rp10 milyar atau telah diaudit oleh KAP				
No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas.	1911
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1838
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan Audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan	1908
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit KAP menggambarkan permasalahan BPR dan diselesaikan tepat waktu.	1924
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ruang lingkup hasil audit telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1916
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		


Catatan:

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

Faktor 7 wajib diisi, karena isian pada sheet Setup, BPR diaudit oleh KAP

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M: BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M: BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko	1947
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) Manajemen Risiko	1930
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) Manajemen Risiko	1930
Total nilai skala penerapan		5		
Rata-rata		1,67		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,84		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan.	1866
2	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris mengevaluasi kebijakan manajemen risiko	1945
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengukuran dan pengendalian risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1881
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh	1951
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1916
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	1846
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah mengikutkan Karyawan untuk mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1892
Total nilai skala penerapan		12		
Rata-rata		1,71		
Bobot		40%		
Nilai proses penerapan		0,68		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1912
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	BPR belum memiliki produk baru atau aktivitas baru	1950
Total nilai skala penerapan		6		
Rata-rata		3,00		
Bobot		10%		
Nilai hasil penerapan		0,30		

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT				
No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit	1908
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang - undangan yang relevan.	1848
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Pemberian kredit telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	1912
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	1,50		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,60		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Tidak terdapat Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit	1943
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Tidak terdapat Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit	1943
	Total nilai skala penerapan	10		
	Rata-rata	5,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,50		

RENCANA BISNIS



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1868
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR mencakup semua rencana strategis jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1866
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis Bank (RBB) didukung oleh Pemegang Saham	1945
	Total nilai skala penerapan	3,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR mempertimbangkan faktor Eksternal dan faktor Internal, azas perbankan serta penerapan manajemen risiko	1862
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Anggota Dewan Pengawas melaksanakan pengawasannya terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan	1846
	Total nilai skala penerapan	2,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan Rencana Bisnis dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1897
	Total nilai skala penerapan	1,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Dengan adanya Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh	1887
	Total nilai skala penerapan	1,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1905
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1923
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaksanakan transparansi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1862
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1907
	Total nilai skala penerapan	4,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara lengkap dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1846
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan Penanganan dan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan tepat pada waktu.	1887
	Total nilai skala penerapan	2,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,228	0,360	-	0,100	0,162	0,198	0,025	0,182	0,120	0,075	0,075	1,525
Peringkat Komposit	1						Predikat Komposit			Sangat Baik		

Kesimpulan

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

PD BPR Bahteramas Baubau dalam kegiatan usahanya akan terus meningkatkan penerapan tata kelola serta melakukan pengkinian standar operasional prosodur (SOP)

▲ Sisa 1844 karakter

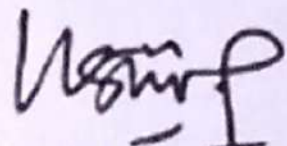
LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD BPR BAHTERAMAS BAUBAU
TAHUN 2024

Baubau, 13 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:



PD. BPR BAHTERAMAS
KAB. BAUBAU
Armansyah, ST.,M.M
Direktur Utama



Hj. Usnia, Amd. Keb.,S.K.M.,M.K.M
Dewan Pengawas

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

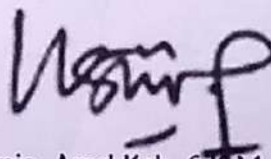
Nama BPR : PD BPR Bahteramas Baubau
Alamat : Jalan Bataraguru No.39 Kelurahan Wajo, Kec, Murhum Kota Baubau
No Telp : 0402-2824600
Posisi Laporan : 31 Desember 2024
Modal Inti : Rp2.898.967.911,-
Total Aset : Rp32.061.588.161,-
Status Audit : Y
Bobot BPR : 1.54
Nilai Komposit : 1
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 09 Tahun 2024

Baubau, 13 Januari 2024


Armanayah, ST., M.M
Direktur Utama


Hj. Usnia, Amd.Keb., S.K.M., M.K.M
Dewan Pengawas

TABEL BOBOT FAKTOR



No	Faktor Penilaian	Bobot A	Bobot B	Bobot C	Bobot D
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15,0	15,0	15,0	12,5
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	2,5
4	Penanganan benturan kepentingan	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Penerapan fungsi audit intern	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Penerapan fungsi audit ekstern	-	2,5	2,5	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	7,5	7,5	7,5
10	Rencana bisnis	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	10,0	7,5	7,5	7,5
	Total (harus 100.0)	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Kriteria Penetapan Bobot	Bobot A	Bobot B	Bobot C	Bobot D
1	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar, total aset kurang dari Rp10 milyar dan tidak diaudit oleh KAP	√			
2	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar dan total aset paling sedikit Rp10 milyar		√		
3	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar, total aset kurang dari Rp10 milyar namun telah diaudit oleh KAP		√		
4	BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 milyar namun kurang dari Rp80 milyar			√	
5	BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80 milyar				√

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR



No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)			Jumlah	Bobot BPR B	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)				
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,00	1,25	1,40	0,50	0,50	0,14	1,14	20,00%	0,228	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah dalam penerapan struktur dan infrastruktur tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ← sisa 1822 karakter
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	3,00	1,75	2,00	1,50	0,70	0,20	2,40	15,00%	0,360	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah dalam penerapan tata kelola belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tata kelola karena BPR memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. ← sisa 1782 karakter
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah ← sisa 1920 karakter
4	Penanganan benturan kepentingan	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	10,00%	0,100	BPR telah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan ← sisa 1943 karakter
5	Penerapan fungsi kepatuhan	1,20	1,80	3,00	0,60	0,72	0,30	1,62	10,00%	0,162	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ← sisa 1731 karakter
6	Penerapan fungsi audit intern	2,20	1,75	1,75	1,10	0,70	0,18	1,98	10,00%	0,198	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah telah memiliki pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi audit internal. ← sisa 1847 karakter
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	2,50%	0,025	BPR telah menindaklanjuti semua temuan baik temuan dari audit kantor akuntan publik maupun temuan dari Otoritas Jasa keuangan. ← sisa 1874 karakter
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	1,67	1,71	3,00	0,84	0,68	0,30	1,82	10,00%	0,182	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko ← sisa 1828 karakter
9	Batas maksimum pemberian kredit	1,00	1,50	5,00	0,50	0,60	0,50	1,60	7,50%	0,120	BPR melakukan kegiatan usahanya berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ← sisa 1919 karakter
10	Rencana bisnis	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	7,50%	0,075	Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank BPR berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh pemegang Saham. ← sisa 1826 karakter
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	7,50%	0,075	transparansi kondisi keuangan BPR melalui laporan Publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ← sisa 1893 karakter
	Nilai Komposit									1,5	
	Peringkat Komposit									1	
	Predikat Komposit									Sangat Baik	

PENJELASAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Berisi penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada form lainnya

BPR merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Maka Penerapan Tata Kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

▲ Sisa 1541 karakter

ANGGOTA DIREKSI



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI				
No	NIK	Nama Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	7471092909820001	Armansyah	0100	Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur BPR dan aturan perbankan lainnya, Menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), Membuat Rencana Bisnis Bank (RBB), Menjaga BPR agar selalu sehat, Memastikan seluruh Operasional Kantor berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Mewakili BPR dalam kerjasama dengan pihak lain, Mewakili BPR dalam menandatangani MOU dengan pihak lain, mewakili BPR dalam hal terjadinya gugatan hukum dengan pihak lain, Menunjuk pihak lain untuk mewakili BPR dalam hal terjadinya gugatan hukum dengan pihak lain, Membuat keputusan strategis dalam hal kemajuan BPR, Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR auditor ektern, hasil Pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya, Mengikuti Komite Kredit, Mencari dana pihak ketiga, Mengotorisasi transaksi sesuai dengan wewenang, membantu Dewan Pengawas membuat Laporan Dewan Pengawas, Mengawasi menilai dan mengoreksi pelaksanaan operasi BPR, Membuat SOP dan aturan internal lainnya, Menerima laporan dari Direktur Operasional dan Manager, Mengunjungi nasabah yang bermasalah maupun calon nasabah, Mengangkat dan memberhentikan karyawan, Menjaga Peralatan kantor yang ada dalam kuasanya, Memberikan edukasi kepada bawahannya guna peningkatan pengetahuan untuk kemajuan BPR, Melakukan rotasi, promosi dan demosi kepada karyawan, Direktur Utama membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta Pejabat eksekutif Manager Operasional, Manager Pemasaran serta seluruh unit kerja operasional BPR, Direktur Utama wajib melaporkan perkembangan kegiatan usaha kepada Dewan Pengawas dan kepada Pemegang Saham.
2	7472025605860001	Asti	0200	Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, standar operasional prosedur BPR dan aturan perbankan lainnya, Membuat Rencana Bisnis Bank bersama Direktur Utama, Membantu Direktur Utama menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Mewakili Direktur Utama bila Direktur Utama berhalangan, bersama Direktur Utama membuat keputusan strategis dalam hal kemajuan BPR, Menjaga BPR agar selalu sehat, Mengawasi perhitungan uang saat dimasukkan/dikeluarkan dari brankas, menjalankan corebanking system pada pagi hari dan menutup corebanking system pada akhir hari, wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya, memegang salah satu kunci brankas, mengikuti komite kredit, mencari dana pihak ketiga, mengotorisasi transaksi sesuai wewenang, membantu Dewan Pengawas membuat laporan kepada Dewan Pengawas, membuat laporan yang menjadi wewenangnya, mengawasi menilai dan mengoreksi pelaksanaan operasi BPR, membuat SOP dan aturan internal lainnya bersama Direktur Utama, menerima laporan dari manager Operasional dan Manager Pemasaran, menjaga peralatan kantor yang ada dalam kuasanya, mengunjungi nasabah yang bermasalah maupun calon nasabah, memberikan edukasi kepada bawahannya guna peningkatan pengetahuan untuk kemajuan BPR, membuat laporan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan kepada Direktur Utama, Direktur Operasional membawahi Pejabat Eksekutif Manager Operasional, Manager Pemasaran, Pejabat eksekutif Manajemen Risiko APU dan PPT serta Kepatuhan dan seluruh unit kerja operasional BPR.
3				
4				
5				

◀ sisa 228 karakter

◀ sisa 301 karakter

◀ sisa 2000 karakter

◀ sisa 2000 karakter

◀ sisa 2000 karakter

Jabatan

- 0100 = Direktur Utama
- 0101 = Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
- 0200 = Direktur
- 0201 = Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	
Uraian tindak lanjut yang telah dilaksanakan	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
BPR telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, posisi 30 Juni 2024 rasio keuangan dinyatakan sehat.	
▲ Sisa 1892 karakter	▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR

Pada file txt A0210 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PD. BPR BAHTERAMAS BAUBAU					
No	NIK	Nama Direksi	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Jumlah kepemilikan saham Anggota Direksi				-	▲ Sisa 1999 karakter
Total Modal Disetor BPR					

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Pada file txt A0220 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Direksi	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain					
					▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPR			HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Armansyah	7471092909820001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Asti	7472025605860001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan			▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
Direktur Utama maupun Direktur Operasional tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi yang lainnya serta Pemegang Saham BPR					
			▲ Sisa 1864 karakter		

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA BPR			HUBUNGAN KELUARGA		
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Armansyah	7471092909820001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Asti	7472025605860001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga			▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
Direktur Utama maupun Direktur Operasional tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham BPR					
			▲ Sisa 1868 karakter		

DEWAN KOMISARIS



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS			
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
1	7471014701730002	Hj. Umi, A.Md Keb..S.K.M, M.K.M	0100
2			
3			
4			
5			

Jabatan
0100 = Komisaris Utama
0101 = Komisaris Utama Independen
0200 = Komisaris
0201 = Komisaris Independen

4 ita 1337 karakter
4 ita 2000 karakter
4 ita 2000 karakter
4 ita 2000 karakter
4 ita 2000 karakter

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI	
Uraian Rekomendasi	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
BPR memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, meningkatkan kinerja keuangan BPR tumbuh secara wajar dan sehat.	

▲ Sisa 1773 karakter

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR

Pada file txt AD410 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PD. BPR BAHTERAMAS BAUBAU				
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persen
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris				
Total Modal/Direktor BPR				

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Pada file txt AD420 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain					

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR				HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	747104701730002	Hj. Umiati, A.Md.Keb.,S.K.M.,M.K.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan				▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris pada BPR.						
▲ Sisa 1911 karakter						

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR				HUBUNGAN KELUARGA		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	747104701730002	Hj. Umiati, A.Md.Keb.,S.K.M.,M.K.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga				▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris pada BPR.						
▲ Sisa 1911 karakter						

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS				Jika Jumlah rapat kurang dari 10x, maka pada file TXT A0810, hapus baris DOI yang tidak terpukul		
No	Tanggal Rapat Sesuai Format Tanggal Komisar	YYYYMMDD	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan		
1	28/03/2024	20240328	19	Pembahasan : a. Kebijakan Strategi, b. Iu Strategi, c. Evaluasi Kinerja, Adapun saran-saran : 1. Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit, 2. Manajemen Keadipian, 3. Laporan Manajemen Risiko Bulanan atau triwulan, 4. Deteksi dini fraud, 5. Penyelesaian kredit hapus buku		
2	28/04/2024	20240428	4	Fokus kepada pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditian Rakyat untuk PD BPR Baheresmas Baubau sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar) rupiah paling lambat 31 Desember 2024. Menindaklanjuti seluruh temuan baik Temuan Otoritas Jasa Keuangan maupun temuan audit Internal. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perkonomian Rakyat yaitu : kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam rangka peningkatan penyakuran kredit BPR maka ditetui untuk mendapatkan fasilitas kredit linkage dari Bank lain, deteksi dini anti fraud bagi Direksi dan karyawan dibagikan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal serta sesuai dengan pakta integritas yang telah ditanda tangani. Peningkatan penyelesaian kredit hapus buku total kredit hapus buku sebesar Rp6.527.858.000,- sesuai dengan ketentuan Internal Direksi dan karyawan yang berhasil menyelesaikan kredit hapus buku diberikan fee, apabila hal ini belum berjalan secara maksimal dimungkinkan untuk penambahan karyawan khusus untuk penanganan kredit hapus buku.		
3	28/06/2024	20240628	3	Fokus kepada pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditian Rakyat untuk PD BPR Baheresmas Baubau sebesar Rp6.000.000.000,- (Enam miliar) rupiah paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Kinerja Direksi dan seluruh karyawan mengalami peningkatan, walaupun belum optimal utamanya yang terkait dengan penyelesaian kredit Hapus Buku. Kredit Hapus Buku masih tetap menjadi beban utama pada BPR Baheresmas Baubau. Pengurus telah menggelar jaringin masalah dengan para guru yang beresifikasi untuk menekan kredit bermasalah. Saran-saran : 1. Peningkatan dana pihak ketiga, 2. Menjalin kerjasama dengan guru sertifikasi, 3. Melakukan pendekatan kepada PSP dan PEMDA, 4. Mengoptimalkan Kinerja BPR.		
4	22/07/2024	20240722	4	Fokus kepada pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditian Rakyat untuk PD BPR Baheresmas Baubau sebesar Rp6.000.000.000 paling lambat 31 Desember 2024. Menjalin kerjasama dengan Pemda Khusus Dinas Pendidikan khusus untuk rekomendasi tabungan murid yang ada diKota Baubau dan pembayaran TPP melau BPR. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan memperhatikan POJK 1 Tahun 2024 tentang kualitas Aset Bank Perkonomian Rakyat dengan kategori : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan macet. Dalam rangka peningkatan penyaluran kredit disetujui untuk kredit linkage. Deteksi dini fraud Direksi dan Karyawan. Peningkatan penyelesaian kredit hapus buku.		
5	02/08/2024	20240802	3	Menindaklanjuti surat dari OJK Nomor SR-33/KO.1602/2024 tentang konsolidasi BPR. Bersama PSP menindaklanjuti konsultasi perubahan PERDA terkait dengan pebeburan. Fokus pada pemenuhan modal inti BPR. Menjalin kerjasama dengan pihak universitas yang ada di Kota Baubau khusus untuk pembiayaan SP dan dana operasional Universitas melalui BPR. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Deteksi dini fraud Direksi dan Karyawan. Peningkatan penyelesaian kredit hapus buku. Untuk masalah likuiditas dimungkinkan untuk melakukan rekrutmen marketing funding. Untuk PE Audit internal lebih maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. PE-Kepatuhan agar memperhatikan pelaporan yang menjadi kewajiban BPR.		
6			6			
7						
8						
9						
10						
11						
12	Jumlah Rapat		5			

Penjelasan lebih lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun
 BPR memiliki 1 (orang) orang Dewan Pegawai dalam pelaksanaan rapat bersama Direksi BPR dilakukan secara tatap muka

▲ Sisa 1887 karakter

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT						
No	NIK	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	Kehadiran			Presen
			Fisik	Tele	Paran	
1	747104701730002	Hj. Umiati, A.Md.Keb.,S.K.M.,M.K.M	3	0	0	50,00
2	-	-	2	-	-	40,00
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rapat			5			
Penjelasan lebih lanjut kehadiran rapat						
Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						
▲ Sisa 1917 karakter						

KOMITE - KOMITE



No	Nama Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab
Catatan: wajib diisi, jika status 01, dan wajib dikosongkan jika status 02			
01	Komite Audit	2	
02	Komite Pemantau Risiko	2	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi	2	

◀ sisa 1 karakter
 ◀ sisa 1 karakter
 ◀ sisa 1 karakter

Status

1 = Memiliki
 2 = Tidak memiliki

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE
Uraian tindak lanjut
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh) miliar rupiah, tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
▲ Sisa 1833 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE

Pada file txt A0132 hanya melaporkan header saja

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIHAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE				KEANGGOTAAN PADA KOMITE			Status
NO	NAMA ANGGOTA KOMITE	NIK	KEAHLIHAN	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Independen
	max 50 karakter	max 25 karakter	max 2000 karakter				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Keanggotaan	independen
00 = Tidak menjabat	1 = Ya
01 = Ketua komite	2 = Tidak
02 = Anggota komite	

TINDAK LANJUT REKOMENDASI Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite
Uraian tindak lanjut
▲ Sisa 2000 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE

Pada file txt A0133 hanya melaporkan header saja

PROGRAM KERJA KOMITE				
NO	KOMITE	PROGRAM KERJA	REALISASI PROGRAM KERJA	JUMLAH RAPAT
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
01	Komite Audit			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Uraian tindak lanjut

▲ Sisa 2000 karakter

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI & FASILITAS LAIN



PAKET REMUNERASI

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji Pokok	2	78.041.490	2	79.602.318
2	Tunjangan-tunjangan		39.743.352		
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya				
Total			117.784.842		79.602.318

Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Uraian kebijakan RUPS

Kesejahteraan Pengurus dan karyawan BPR telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

▲ Sisa 1905 karakter

FASILITAS LAIN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DIREKSI
1	Perumahan	Direksi telah mendapatkan fasilitas pengganti sewa rumah
2	Transportasi	Direksi tidak mendapatkan tunjangan transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Direksi mendapatkan asuransi kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Direksi mendapatkan fasilitas lainnya seperti kendaraan dinas

◀ sisa 1944 karakter

◀ sisa 1952 karakter

◀ sisa 1962 karakter

◀ sisa 1939 karakter

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DEWAN KOMISARIS
1	Perumahan	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas perumahan
2	Transportasi	Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Dewan Komisaris tidak mendapatkan asuransi kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas lainnya

◀ sisa 1947 karakter

◀ sisa 1944 karakter

◀ sisa 1948 karakter

◀ sisa 1949 karakter

Penjelasan Lebih Lanjut Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Uraian penjelasan

Fasilitas yang diperoleh Pengurus telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

▲ Sisa 1911 karakter

RASIO GAJI

RASIO GAJI TERTINGGI TERHADAP GAJI TERENDAH

No	Keterangan	a/b	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	217,00	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	126,95	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	125,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	250,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	272,94	1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Penjelasan Lebih Lanjut Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian penjelasan

BPR memberikan kesejahteraan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▲ Sisa 1872 karakter

PENYIMPANGAN INTERNAL / FRAUD



No	PENYIMPANGAN INTERNAL	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
		ANGGOTA DIREKSI		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Uraian penjelasan

Tidak terjadi penyimpangan internal/fraud pada BPR pada tahun laporan maupun tahun sebelumnya baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan.

▲ Sisa 1859 karakter

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

No	URAIAN PERMASALAHAN	JUMLAH KASUS YANG DIHADAPI	
		Perdata	Pidana
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
2	Dalam Proses Penyelesaian		

Penjelasan Lebih Lanjut Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian penjelasan

Pada tahun laporan BPR tidak terlibat dalam permasalahan hukum perdata dengan pihak debitur.

▲ Sisa 1908 karakter

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN



No	PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN			PENGAMBIL KEPUTUSAN			JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	KETERANGAN
	NAMA	JABATAN	NIK	NAMA	JABATAN	NIK		Jutaan Rupiah	
1	0	0	0	0	0	0	0	-	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

▲ 50 karakter

▲ 50 karakter

▲ 25 karakter

▲ 50 karakter

▲ 50 karakter

▲ 25 karakter

▲ 100 karakter

▲ 2000 karakter

Penjelasan Lebih Lanjut Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Uraian penjelasan

Pada tahun laporan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

▲ Sisa 1920 karakter

Jika jumlah benturan kepentingan kurang dari 10x, maka pada file TXT A1100, hapus baris D01 yang tidak terpakai

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK



No	Tanggal Pelaksanaan		Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	Format tanggal komputer	YYYYMMDD				
1	19/02/2024	20240219	01	Sumbangan untuk berkebutuhan Khusus	Pribadi ybs	200.000
2	02/05/2024	20240502	02	Open turname volly ball bombana cup II 2024	Panitia	12.500.000
3	16/01/2024	20240116	02	Hut Walikota Baubau (pembelian tumpeng)	Keluarga	1.000.000
4	26/04/2024	20240426	01	Sumbangan Dukacita	PE-Audit Internal BPR Bahteramas Baubau	1.000.000
5	23/05/2024	20240523	01	Karangan bunga dukacita	PE-MP BPR Bahteramas Baubau	600.000
6	22/06/2024	20240622	02	HUT BPR-BPRS	Panitia	8.352.000
7	22/06/2024	20240622	02	HUT Sultra Koltim	Panitia	8.000.000
8	28/08/2024	20240828	01	Karangan Bunga Dukacita	H. Nuddin (Deposan)	600.000
9	15/09/2024	20240915	01	Karangan Bunga Dukacita	Mantan Karyawan BPR Bahteramas Baubau	600.000
10	11/10/2024	20241011	01	Karangan Bunga Dukacita	Wolowa	1.300.000
11	16/10/2024	20241016	02	Hut Kota Baubau	Kegiatan Haroana Baubau	4.000.000
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

▲ 2000 karakter

▲ 100 karakter

Jenis Kegiatan

- 01 = Sosial
- 02 = Politik

Jika jumlah pemberian kurang dari 20x, maka pada file TXT A1200, hapus baris D01 yang tidak terpakai

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Uraian penjelasan

Karena BPR merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah maka berperan aktif dalam kegiatan politik maupun kegiatan sosial.

▲ Sisa 1884 karakter



NOTARIS

MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H.,M.Kn.

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
.....

"PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BAUBAU (PERSERODA)"
.....

TANGGAL : 25 JULI 2025

NOMOR : 345

JL. SYECH YUSUF NO.19
TELP / FAX : (0401) 3123805
KENDARI - SULAWESI TENGGARA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PEMEMANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
"PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BAUBAU
(PESERODA)"**

Nomor : 345



- Pada hari ini, Jumat, pada tanggal 25-07-2025 (dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima) pukul 15.25 WITA (lima belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Tengah. -----
- Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kendari, dengan dihadiri-----
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan **ARMANSYAH**, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, lahir di Sorong,-----
pada tanggal 29-09-1982 (dua puluh sembilan bulan september tahun seribu-
Sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Badan Usaha Milik Daerah,-----
bertempat tinggal di Jalan Btn Bukut Memory Blok G Nomor 8, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, -----
Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
7471016707810003. -----
- Untuk sementara berada di Kota Kendari. -----
- Penghadap menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
kuasa yang dimuat dalam "Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -
(Keputusan Para Pemegang Saham) Perseroan Terbatas -----
"BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BAUBAU" (yang akan --
di uraikan kemudian), berkedudukan di Kota BauBau, yang Anggaran---
Dasarnya dimuat dalam akta pendirian, Nomor : 01, tertanggal 17-01-2025
(tujuh belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima) yang dibuat---
dihadapan **YULI SAMBIRA**, *Sarjana Hukum, Magister Kenotariatanm*, Notaris--
Kota Bau-Bau, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor : -----
AHU-0004178.AH.01.01 TAHUN 2025, tertanggal 30-01-2025 (tiga puluh--
bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima). -----
- Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga :-----

----- **PERSEROAN** -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----
- Bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/mengambil----- keputusan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari keputusan sirkuler para-- pemegang saham ("Keputusan Para Pemegang Saham") Perseroan, yang dibuat secara di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 03-07-2025 (tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima) dan ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya dalam akta ini akan disebut Keputusan Para Pemegang Saham). -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ----- 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Pemegang ----- Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara-- menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -
- Bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang Saham yang telah---- menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham tersebut adalah segenap-- pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah-- ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga tanggal dan hari yang paling akhir Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ditandatangani, yaitu-- sebanyak 4969 (**empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan**) lembar saham, sebagai berikut : -----
- 1. **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, tersebut;-----
 - Bertindak sebagai pemegang saham 4474 (empat ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham dalam perseroan. -----
- 2. **PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU**, tersebut :-----
 - Bertindak pemegang 200 (dua ratus) saham dalam perseroan. -----
- 3. **KECAMATAN SE KOTA BAUBAU**, tersebut;-----
 - Bertindak pemegang 44 (empat puluh empat) saham dalam perseroan. ---
- 4. **KELURAHAN SE KOTA BAUBAU**, tersebut;-----
 - Bertindak pemegang 251 (dua ratus lima puluh satu) saham dalam perseroan.-----

- Bahwa penghadap dengan ini menerangkan, menanggung dan menjamin ----- sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tanda tangan yang ada dalam ----- Keputusan Para Pemegang Saham tersebut. -----
 - Bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa kepada ----- penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham,-- untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris.-----
 - Bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan tersebut dalam akta ini; ----
 - Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap senantiasa -- bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu ----- menerangkan dengan ini menyatakan keputusan yang telah diambil tersebut -- sebagai berikut:-----
1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Habib Basuni & Rekan dengan Opini Wajar.-----
 2. Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) Tahun 2025;-----
 3. Menyetujui dan Mengesahkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Persetujuan Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut:--
 - a. Kantor Akuntan Publik Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);--
 - b. Melakukan Evaluasi Kepada Kantor Akuntan Publik Yang Mengajukan surat penawaran audit pada PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA);-----
 4. Menyetujui dan mengesahkan Peleburan PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Kendari (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Konawe (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Kolaka (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Konawe Selatan (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Bombana (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Wakatobi (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Raha (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Kolaka Utara (PERSERODA), PT BPR Bahteramas Buton Utara (PERSERODA), PT BPR

- Bahteramas Konawe Utara (PERSERODA) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Sulawesi Tenggara (PERSERODA);-----
5. Menyetujui dan Mengesahkan segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peleburan yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan disesuaikan dengan kemampuan PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.-----
 6. Menyetujui Pembagian Laba Tahun Buku 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk semua pemegang saham berdasarkan komposisi saham;-----
 - b. Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dibukukan untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan;-----
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen) dibukukan untuk CSR;-----
 - d. Tantiem 4% (empat persen);-----
 - e. Jasa produksi 8% (delapan persen) diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku;-----
 - f. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Pengurus dan Pegawai.-----
 7. Menyetujui dan Mengesahkan penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) oleh Direksi PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) untuk kepentingan Pendidikan, keagamaan, sosial kemasayarakatan, ekonomi, olahraga dan kepemudaan untuk peningkatan brand image positif PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA);-----
 8. Menyetujui Pelaksanaan seleksi calon pengurus (Komisaris dan Direksi) PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (PERSERODA);-----
 9. Menyetujui pemberian fasilitas bagi Pengurus (Komisaris dan Direksi) PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah dan sesuai kemampuan PT BPR Bahteramas

Baubau (PERSERODA) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisaris, adapun rincian sebagai berikut :-----

Gaji Pokok	Direktur Utama paling banyak 2,5 kali gaji pokok pegawai tertinggi dan Direktur Operasional menerima 80% dari gaji pokok Direktur Utama.
	Honorarium Komisaris Utama paling banyak 40% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan Direktur Utama, sedangkan Komisaris besarnya paling banyak 80% dari jumlah honorarium Komisaris Utama
Tunjangan jabatan	Diberikan kepada Direksi 1 (satu) kali dari gaji pokok Direksi
Tunjangan Istri/Suami/Anak	Diberikan masing-masing 10% Tunjangan Istri/Suami dan 5% tunjangan anak dari gaji pokok Direksi (maksimal 3 orang anak)
Tunjangan Hari Raya	Minimal 1 (satu) kali gaji, maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan BPR.
Tunjangan Perumahan dan atau Pengganti Sewa	Direktur Utama mendapat tunjangan perumahan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Direktur Operasional paling banyak 80% dari Tunjangan Perumahan yang diterima Direktur Utama
Asuransi Imbalan kerja	Minimal Rp 200.000,- dalam sebulan
BPJS Kesehatan	Sesuai dengan perhitungan iuran dari badan penyelenggara yang ditetapkan oleh Pemerintah
BPJS Ketenagakerjaan	
Dana Penunjang Operasional	Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan Dana Penunjang Operasional paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil
Dana representasi	Direksi dapat diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank, yang penggunaannya dipertanggungjawabkan dengan Pakta Integritas
Jasa Pengabdian	Anggota Direksi dan Anggota Komisaris setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai kemampuan BPR.
Pengganti cuti	Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat cuti selama 2 (dua) bulan dan atau diberikan uang pengganti cuti yang besarnya sama dengan jumlah gaji terakhir dua bulan.

10. Menyetujui dan Mengesahkan penyesuaian Gaji dan/atau Upah serta tunjangan lainnya bagi Pengurus dan Pegawai PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain terkait gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya serta penyesuaian Upah Minimum

- Regional yang berlaku di Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi. -----
11. Menyetujui dan mengesahkan pemberian Remunerasi (Bonus dan/atau insentif) bagi Pengurus dan Pegawai sebagai bentuk apresiasi kinerja akhir tahun sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi. -----
12. Menyetujui dan mengesahkan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Baubau dalam bentuk modal disetor dan/atau dalam bentuk Aset Tanah dan/atau Bangunan. -----
13. Menyetujui dan mengesahkan pengadaan/pembelian dan penjualan serta penghapusbukuan terkait asset tetap dan inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
14. Menyetujui Kerjasama yang dilakukan dengan : -----
- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
 - b. Pemerintah Kota Baubau; -----
 - c. Untuk dan atas nama PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) meminjam uang kepada Bank Umum dan/atau BPR termasuk dalam hal : -----
 - Perpanjangan, perubahan, pembaharuan dan penambahan fasilitas kredit yang diakui sebagai pinjaman PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA) baik sebelum peleburan BPR maupun setelah peleburan BPR; -----
 - Membuka fasilitas kredit dengan Bank Umum dan/atau BPR dan menyetujui syarat-syarat umum perjanjian kredit; -----
 - Menandatangani perjanjian kredit serta hal lain yang dipandang perlu dalam kaitannya dengan fasilitas kredit dengan Bank Umum dan/atau BPR; -----
 - Menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada Bank Umum dan/atau BPR atas fasilitas kredit yang diterima. -----
 - d. Lembaga Jasa Non keuangan, Asosiasi BPR, Financial Technology (Fintech), sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Bahteramas (PERSERODA) Baubau dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
15. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi PT BPR Bahteramas Baubau (PERSERODA), untuk menuangkan isi keputusan para Pemegang

Saham Perseroan dalam suatu akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kendari pada hari dan tanggal----
tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh Tuan **MUHAMMAD IRFAN**, ---
Sarjana Hukum lahir di Kendari, pada tanggal 16-05-1990 (enam belas bulan ---
Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), dan Nona -----
SYAHRANI KHAIRUN NISA, *Sarjana Hukum*, lahir di Kendari, pada tanggal -----
09-06-1997 (sembilan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
tujuh) keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Kendari, ----
yang saya, Notaris, Kenal sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-
saksi maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, --
Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

-NOTARIS KOTA KENDARI-



MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.